



## **PERAN KOPERASI UNIT DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TANJUNG BUNGONG KECAMATAN KAWAY XVI**

**Dar Kasih**

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh  
[darkasih@staindirundeng.ac.id](mailto:darkasih@staindirundeng.ac.id)

### **Abstract**

*This article examines the roles of village unit cooperatives in community empowerment in Tanjung Bungong village. The aim of this study was to determine the roles of cooperatives as an empowering tool for the community and to determine the priority sectors that receive assistance from the village unit cooperatives in Tanjung Bungong Village, Kaway XVI Subdistrict. The method used in this study was the descriptive qualitative method. The data collection was conducted through interviews, observations, documentation, and documentary analysis from the written documents related to this research. Based on the study results, it can be concluded that the empowerment programs run by the cooperatives at Tanjung Bungong Village, Kaway XVI Subdistrict, include some programs, i.e., savings and loans, business capital assistance, and providing agricultural materials for the community. The role of cooperatives in community empowerment efforts in Tanjung Bungong Village uses the ACTORS indicators (Authority, Confidence, and Competence, Trust, Opportunity, Responsibility, Support). The existence of village cooperatives helps and develops various sectors of activities carried out by the cooperative members, such as the agricultural, trade, industry, and services sectors.*

**Keywords:** Cooperative, Community Empowerment, Village

### **Abstrak**

*Artikel ini mengkaji peran koperasi unit desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Bungong. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran koperasi dalam pemberdayaan masyarakat serta untuk mengetahui sektor prioritas dalam bantuan koperasi di Desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway XVI. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, serta analisis data yang diperoleh dari dokumen tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk pemberdayaan koperasi Desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway XVI meliputi berbagai kegiatan dan program yang dijalankan seperti simpan pinjam, bantuan modal usaha, dan pengadaan bahan-bahan pertanian untuk masyarakat. Peran koperasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Bungong menggunakan indikator ACTORS (Authority, Confidence and competence, Trust, Opportunity, Responsibility, Support). Peran keberadaan koperasi desa turut membantu dan mengembangkan berbagai sektor kegiatan yang dilakukan oleh anggota koperasi seperti sektor pertanian pada umumnya, perdagangan, industri, dan jasa.*

**Kata Kunci:** Koperasi, Pemberdayaan Masyarakat, Desa

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial berdasarkan yang tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 memiliki harapan dalam mewujudkan cita-cita luhur Bangsa Indonesia. Masalah pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang harus

diperhatikan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat sehingga tujuan bangsa Indonesia dalam upaya kesejahteraan sosial dapat tercapai. Tujuan pemberdayaan dalam rangka kemandirian ekonomi warga yakni dengan menjalankan asas demokrasi ekonomi yang diamanatkan dalam UUD 1945. Dalam demokrasi ekonomi yang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah koperasi. Lembaga koperasi yang dibentuk bertujuan membangun kemandirian ekonomi warga ialah membangun lembaga koperasi bina usaha di pedesaan.

Berbicara mengenai koperasi, secara etimologi koperasi dari Bahasa Inggris *co-operation, cooperative* sedangkan dalam Bahasa Latin *coopere* yang memiliki arti bekerja bersama-sama, atau usaha bersama. Menurut Sudrayat yang berpedoman pada Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, menjelaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sehingga menjadi pergerak ekonomi kerakyatan yang berdasarkan asas kekeluargaan (Pasal 1 Angka 1 UUP).<sup>1</sup> Berdasarkan pasal tersebut cukup beralasan jika suatu daerah terdapat lembaga koperasi dan masyarakat sebagai anggota. adapun tujuan keberadaan koperasi ini ialah agar terlaksanakannya pemberdayaan kearah kemandirian masyarakat, upaya penanggulangan, pengetasan, dan meminimalisir tingkat kemiskinan melalui pemberdayaan.

Penyebab timbulnya kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh permasalahan sosial ekonomi semata, terdapat beberapa faktor lainnya seperti tingkat pendidikan,

kepemilikan lahan, kesulitan bantuan modal, akses informasi, dan akses pasar yang sulit.<sup>2</sup> Kemiskinan merupakan kondisi krisis sosial ekonomi yang memiliki dampak *multiplier effect* terhadap kehidupan masyarakat. wilayah pedesaan sangat indetik sebagai kawasan “kemiskinan”, namun faktanya masih banyak masyarakat yang tinggal dipedesaan memiliki pendapatan rendah dan sulit dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. Pada umumnya mereka hidup dalam keterbatasan dalam berbagai aspek, pendapatan dan pendidikan rendah, serta ketidakberdayaan dalam memenuhi standar kehidupan yang layak. Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan disebabkan oleh masalah ekonomi, juga kurang nya akses masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat, dan informasi. oleh sebab melalui pemberdayaan masyarakat dalam peran koperasi diharapkan mampu mengembangkan potensi ekonomi rakyat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sehingga tujuan untuk kemandirian dapat terwujud.

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip itu tidaklah menyimpang dari sudut syariah yaitu prinsip gotong royong dan bersifat kolektif (kebersamaan) dalam membangun kemandirian hidup.<sup>3</sup>

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangun kemampuan (*capacity building*) masyarakat dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana, serta pengembangan 3 P (pendampingan, penyuluhan, dan pelayanan).

---

<sup>1</sup>Sudaryat Permana, (2009) *Bikin Perusahaan Itu Gampang*, Yogyakarta: MedPress, 39

<sup>2</sup>Hikmat Kusumaningrat, (2009) *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, hlm. 148-149.

<sup>3</sup>Nur Syamsudin Buchori, (2012) *Koperasi Syariah: Teori dan Praktek*, Tangerang: Pustaka Afa Media, hlm. 7

Pendampingan akan mengerakkan partisipasi total masyarakat, penyeluhan dapat merespon dan memantau perubahan yang terjadi di masyarakat, dan pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi asset sumber daya fisik dan non fisik yang diperlukan oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Penelitian mengenai koperasi dalam pemberdayaan masyarakat bukanlah isu baru, terdapat beberapa penelitian menegenai peran koperasi dalam pemberdayaan masyarakat seperti oleh Chyntia Putri Devanty, Tahun 2017 yang berjudul Peran Koperasi Wanita Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Pada Koperasi Wanita di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar. Nurul Hidayah Tahun 2019 yang berjudul Peran Koperasi Produsen Dalam Pemberdayaan Produksi Anggota di Koperasi Nira Kamukten Gumelen Wetan Susukan Banjarnegara Perspektif Ekonomi Islam menghasilkan Pemberdayaan Koperasi Produsen Bagi Anggota di Koperasi Nira Kamukten Gumelen Wetan Susukan Banjarnegara Perspektif Ekonomi. Desa Tanjung Bungong terletak di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat merupakan salah desa yang terletak di akses jalan lintas antar kabupaten Aceh Barat dengan Sigli. Jumlah penduduknya sebanyak 431 Jiwa dan terdiri dari 62 Kepala Keluarga dan mata pencaharian masyarakatnya umumnya bergerak di bidang pertanian. Di Desa Tanjung Bungong terdapat Koperasi Unit Desa yang menjalankan program pinjaman untuk modal usaha bagi anggotanya. Hasil wawancara dengan pengelola unit koperasi desa menyebutkan pinjaman para anggotanya banyak digunakan dalam bidang modal usaha dan pertanian.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Koperasi**

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.27 Tahun 2007, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Ropke, koperasi adalah badan usaha dengan kepemilikan dan pemakai jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha itu. Sedangkan menurut Rudianto, koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya dengan demikian koperasi merupakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian

---

<sup>4</sup>Zubaedi, (2013) *Pengembangan Masyarakat (Wacana & Praktik)* cetakan ke-1 Jakarta : Kencana, hlm. 76

<sup>5</sup>Ropke, Jochen. (2003). *Ekonomi Koperasi, Teori dan Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat. hlm. 31

nasional yang demokratis dan berkeadilan. Adapun fungsi dan peranan koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sokogurunya.
- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berupa usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>6</sup>

## 2. Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat yang efektif adalah yang dilakukan secara bertahap. Tujuan adanya tahapan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyiapkan diri untuk mengelola aktivitas pemberdayaan. Pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto adalah sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan, yaitu: penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.<sup>7</sup>

*Pertama*, penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin. Kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka

dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, dan healing. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun “demand”) diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (tidak dari orang luar).

*Kedua*, pengkapasitasan. Inilah yang sering kita sebut “capacity building”, atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau *enabling*. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Proses *capacity building* terdiri atas tiga jenis, yaitu: manusia, organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia dalam arti memampukan manusia baik dalam konteks individu maupun kelompok. Kita tidak asing dengan konsep ini karena sudah amat sering melakukan pelatihan, workshop, seminar, dan sejenisnya-dimasa “Orba” kita juga sering menggunakan istilah “simulasi” untuk sosialisasi P4.

Menurut Effendi, prinsip-prinsip dasar pemberdayaan masyarakat ada 9 (sembilan).<sup>8</sup> *Pertama*, Prinsip partisipasi. Bahwa kegiatan pemberdayaan dalam pelaksanaannya harus lebih banyak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat miskin sendiri mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan sampai pada tahap memetik hasil. *Kedua*, Prinsip sustainable. Prinsip ini mengarahkan bahwa hasil-hasil yang dicapai melalui kegiatan pemberdayaan hendaknya dapat dilestarikan masyarakat sendiri

<sup>6</sup>Hendrojogi. (2004). *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 30

<sup>7</sup>Bahri, E. S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi*. Kediri: FAM Publishing.

<sup>8</sup>Sutikno, S. (2005). *Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*.

sehingga menciptakan pemupukan modal (*capital accumulation*) dalam wadah sosial ekonomi setempat. Prinsip lain yang perlu diperhatikan adalah perlu dilakukan penguatan kepada institusi dan kelompok sasaran agar mereka mampu melanjutkan program secara mandiri dan berkelanjutan kegiatan pengelolaan program/ proyek telah berakhir.

*Ketiga*, Prinsip demokratisasi. Prinsip ini menghendaki agar dalam kegiatan pemberdayaan perlu diberikan kesempatan dan keleluasaan kepada rakyat dalam hal untuk menentukan sendiri strategi dan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang mereka miliki.

*Kempat*, Prinsip transparansi. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa kegiatan pemberdayaan itu melibatkan berbagai pihak sehingga dalam pengelolaan setiap sumberdaya, terutama keuangan harus dilakukan secara transparan (terbuka) agar semua pihak ikut memantau atau mengawasi penyaluran dana mulai dari pihak sponsor sampai pada masyarakat sasaran.

*Kelima*, Prinsip akuntabilitas. Prinsip ini mengharuskan pengelolaan keuangan harus dapat dilakukan oleh masyarakat dan pelaksana program/proyek secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

*Keenam*, Prinsip desentralisasi Dengan prinsip ini dimaksudkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bukan lagi dilakukan secara terpusat atau tersentralisasi dengan petunjuk dan aturan-aturan yang ketat yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam era pemberdayaan ini prinsip desentralisasi dapat dikedepankan karena dibukanya ruang politik untuk mereformasi proses perencanaan dan pengambilan keputusan dari yang sebelumnya sangat sentralistik dan top-down menjadi

lebih demokratis dan berorientasi pada kebutuhan warga.

*Ketujuh*, Prinsip *acceptable*. Prinsip mengarah agar bantuan yang diberikan kepada kelompok sasaran hendaknya dikelola sedemikian rupa agar mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola.

*Kedelapan*, Prinsip *profitable*. Dengan prinsip ini dimaksudkan memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis. Maksudnya bahwa kegiatan yang dipilih oleh kelompok sasaran harus dapat meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya sehingga taraf hidup kelompok sasaran lebih baik dari keadaan sebelumnya. Setiap kegiatan harus berdampak ekonomis yang nyata bagi anggota kelompok.

*Kesembilan*, Prinsip *replicable*. Prinsip ini mengisyaratkan agar pengelola program pemberdayaan agar dapat memperhatikan aspek pengelolaan dana dan pelestarian harus dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

### **C. METODOLOGI**

Penelitian ini berlokasi di Desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Fokus penelitian ini pada anggota koperasi unit desa yang berjumlah 18 anggota. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan, menguraikan dan menganalisa secara mendalam hasil penelitian.<sup>9</sup>

Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Data primer ialah

---

<sup>9</sup>Hadar Nawawi, (2005) *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm.

sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung melalui wawancara. Sumber data primer ini masyarakat dan perangkat desa yang terlibat dalam koperasi. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak dilakukan secara langsung oleh peneliti.<sup>10</sup>

Dalam teknik pengumpulan data penelitian bertujuan mengungkap fakta dan fenomena mengenai variabel yang diteliti secara *Cross Section*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan observasi meliputi kegiatan pemusatan perhatian suatu objek dengan untuk mengamati aktivitas anggota koperasi dalam usaha yang dijalankannya. Selanjutnya wawancara bertujuan untuk memperoleh dan menggali data tentang peran koperasi dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam metode dokumentasi ini peneliti akan mengambil rekaman dan foto-foto untuk bukti dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini tidak menetapkan jumlah informan, namun pengambilan sampel penelitian disesuaikan dengan kebutuhan data dan tujuan penelitian. Jika data yang diinginkan sudah terpenuhi maka penelitian akan dihentikan. Adapaun jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 12 (dua belas) orang. data diperoleh dilapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang tersusun secara sistematis agar menjadi informasi yang jelas, rinci dan akurat dengan menarik kesimpulan. Oleh karena itu teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis nonstatistika.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Peran Koperasi Unit Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan bertujuan mewujudkan kemandirian masyarakat, baik kemandirian

berfikir, sikap, dan tindakan yang bertujuan pada pencapaian harapan hidup yang lebih baik. Begitu juga dengan upaya pemberdayaan yang dilakukan terhadap oleh lembaga koperasi di desa-desa, dimana tujuan lahirnya koperasi bertujuan mewujudkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Keberadaan koperasi sudah banyak memberikan dampak positif terhadap berbagai kegiatan dan bantuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

Bentuk pemberdayaan koperasi Desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway XVI meliputi berbagai kegiatan dan program yang dijalankan seperti simpan pinjam, bantuan modal usaha, dan pengadaan bahan-bahan pertanian untuk masyarakat. kondisi masyarakat Desa Tanjung Bungong yang tergolong menengah kebawah umumnya berprofesi sebagai petani, buruh bangunan, dagang, dan kerja serabutan menjadikan peran koperasi sangatlah membantu dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Berbagai upaya pemerintah desa dalam memberikan pelayanan koperasi kepada anggota masyarakat yang terlibat dalam berbagai bentuk usaha yang dijalankannya. Namun dalam menjalankan program koperasi tentu memiliki persyaratan dan peraturan yang akan diterapkan oleh anggota koperasi.

Dalam menjalankan program dan peran koperasi bertujuan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Bungong, menggunakan indikator ACTORS (*Authority, Confidence and competence, Trust, Opportunity, Responsibility, Support*) Rincian indikator tersebut meliputi:

##### **a. Authority (Kewenangan)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus beserta anggota Koperasi yang ada di Desa Tanjung Bungong memperoleh

---

<sup>10</sup>Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara.

informasi bahwa koperasi unit desa mempunyai wewenang pada setiap anggota dengan memberikan dana pinjaman. Melalui dana pinjaman diharapkan anggota dapat termotivasi dan membantu mereka dalam mewujudkan usahanya, seperti asupan modal pada usaha yang anggota jalankan disektor perkebunan, pabrik batu bata, ternak, dan wirausaha lainnya, sehingga mereka akan mampu mengelola usahanya sendiri. Kewenangan koperasi unit desa melalui dana pinjaman kepada anggotanya, terdapat aturan dan batas waktunya, kisaran batasan yang diperbolehkan koperasi berikan berkisar antara 1 – 15 juta rupiah. Setiap anggota yang meminjamkan dana koperasi dikenakan biaya bunga sesuai dengan kesepakatan antara lembaga koperasi dengan anggotanya. Kisaran bunga yang koperasi sebesar 2 persen untuk koperasi simpan pinjam sehingga perkembangan koperasi desa dapat bertahan dan menjalankan fungsinya. Mekanisme pembayaran serta biaya bunga koperasi sudah disepakati melalui rapat rutin tahunan kepengurusan anggota koperasi.

b. *Confidence and competence* (Rasa Percaya Diri dan kemampuan)

Peran koperasi dalam meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan para anggotanya, koperasi unit desa Tanjung Bungong memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada para anggotanya dalam rencana peminjaman, penggunaan dana, dan cara membayar agar anggota siap untuk memanfaatkan peluang modal usaha dari koperasi desa. Pengurus koperasi desa menetapkan persyaratan dan peraturan yang telah disepakati dalam aspek pengambilan, penyeteroran, dan evaluasi lembaga hal ini bertujuan agar keberlanjutan lembaga koperasi serta mencegah terjadinya kredit macet. Selain kegiatan dan penyuluhan, pengurus koperasi juga melakukan kegiatan

pendampingan program usaha yang dilaksanakan oleh para anggotanya.

c. *Trust* (Keyakinan)

Peran koperasi unit desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat/anggota memiliki peraturan berlandaskan hukum sehingga para anggota memiliki kepercayaan dalam menjalankan berbagai usaha dan kegiatan dari dana pinjaman. Keyakinan masyarakat dalam menjalankan roda koperasi juga di dorong oleh kebijakan pemerintah desa dengan mewujudkan sikap transparansi dan keterbukaan informasi melalui kegiatan pertemuan rutinitas setiap bulannya. Selain itu, para pengurus dan anggota koperasi memiliki rasa kebersamaan dalam menjaga keberlangsungan koperasi unit desa.

d. *Opportunity* (Kesempatan)

Peran koperasi desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat Desa Lapang memberikan peluang dan kesempatan kepada anggota adalah melalui pemberian pinjaman. Koperasi Unit Desa Tanjung Bungong mampu mengadakan pelatihan sendiri dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk turut serta kedalam kepengurusan koperasi dengan syarat merupakan penduduk tetap desa. Melalui anggaran SHU (Sisa Hasil Usaha) yang ada di koperasi para pengurus dan anggotanya diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan wirausaha yang dilaksanakan oleh lembaga koperasi. Selain menggunakan dana SHU, pengurus koperasi desa juga berupaya mencari berbagai mitra dan lembaga pemerintah untuk bekerja sama dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan keberlangsungan lembaga koperasi.

e. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Koperasi Desa Tanjung Bungong dalam menjalankan fungsinya bersikap transparan akuntabel, serta dengan mengelola dan mempertanggung jawabkan kinerja mereka pada RAT (Rapat Anggota Tahunan)

bertujuan untuk kemajuan koperasi desa itu sendiri. Rapat Anggota Tahunan beragendakan rutinitas setiap triwulan (3 Bulan) yang dihadiri oleh para pengurus dan anggota bertujuan untuk memperoleh informasi perkembangan koperasi serta anggota dapat melunasi pinjaman yang mereka lakukan. Mengenai adanya anggota kredit macet oleh anggota peminjam dana, pengurus mempunyai kebijakan dimana para anggota harus melunasi terlebih dahulu seluruh pinjaman agar anggota bersangkutan dengan lainnya dapat bergiliran meminjamkan dana. Harapan lembaga koperasi unit desa kepada para anggota yang meminjam dana dapat dimanfaatkan untuk keperluan modal usaha dan kebutuhan lainnya sehingga tujuan pemberdayaan ekonomi dapat tercapai.

f. *Support* (Dukungan)

Tindakan dukungan pengurus koperasi dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan dukungan kepada anggota berupa dana pinjaman serta para pengurus koperasi bersikap rela bekerja dalam menjalankan lembaga koperasi dengan tidak menerima gaji atau sukarela. Pemerintah Kabupaten turut serta memberikan dukungan terhadap koperasi desa seperti memberikan dana hibah dari pemerintah, perusahaan, dan bantuan hibah lainnya yang bersifat tidak mengikat. Melalui lembaga koperasi, masyarakat/anggota juga dibentuk berbagai kelompok usaha (Kelompok Tani, Peternak, Pabrik Batu Bata, dan Kelompok Perkebunan) sehingga memudahkan para kelompok tersebut untuk menerima bantuan usaha dari pemerintah dan LSM. Koperasi Unit Desa bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan pembinaan kepada pengurus/anggota berupa pelatihan dalam membuat laporan keuangan sehingga diharapkan akan mampu mengelola pembukuan di dalam koperasi.

## **2. Penggunaan Dana Koperasi**

Peran keberadaan koperasi desa turut membantu dan mengembangkan berbagai sektor kegiatan yang dilakukan oleh anggota koperasi. Adapun beberapa sektor kegiatan yang digunakan oleh masyarakat Desa Tanjung Bungong ialah sebagai berikut:

a. Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor mata pencaharian dan penunjang pendapatan utama masyarakat Desa Tanjung Bungong. Koperasi desa menjadi modal bagi anggotanya dalam menjalankan usaha pertanian. Terdapat berbagai kegiatan pertanian yang dilakukan oleh para anggota umumnya menanam padi, menanam swait, dan peternakan. Dalam hal ini koperasi menyediakan pinjaman rutin kepada anggota yang membutuhkan modal tambahan untuk menjalankan usahanya. Salah satu pemanfaatan koperasi di sektor pertanian ialah dengan pembelian bibit unggul, ternak, pakan dan juga pupuk untuk masyarakat. Sistem pembayarannya ketika pasca panen dan juga adanya tempo waktu yang telah disepakati.

b. Perdagangan

Peran koperasi unit desa dalam membantu anggotanya menjalankan usaha perdagangan ialah dengan memberikan bantuan modal pinjaman yang akan di kembalikan sesuai dengan perjanjian anggota koperasi. Besaran biaya yang disediakan sekitar 1 juta hingga 5 juta sesuai dengan kesepakatan lembaga koperasi. Adapun sistem pengembalian dengan menyetor setiap bulannya kepada lembaga koperasi unit desa. Hasil observasi mendapatkan aktivitas perdagangan yang dilakukan para anggota seperti usaha kelontong, makanan, dan usaha warung kopi.

c. Industri

Kegiatan industri yang dijalankan oleh masyarakat tanjung bungong ialah industri



pabrik batu bata. Hasil wawancara dengan pelaku usaha pabrik batu bata, dalam sebulan bisa menghasilkan 15 ribu s.d 20 ribu batu bata dengan harga jual sekitar Rp.400/butir. Selain industri batu bata terdapat juga *Home Industri* (Industry Rumah) yang berupa pembuatan produk dengan skala kecil seperti kue tradisional dan kue basah.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di masyarakat, penulis menemukan bentuk pemberdayaan koperasi unit desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway XVI meliputi berbagai kegiatan dan program yang dijalankan seperti simpan pinjam, bantuan modal usaha, dan pengadaan bahan-bahan pertanian untuk masyarakat. Kondisi masyarakat Desa Tanjung Bungong yang tergolong menengah kebawah umumnya berprofesi sebagai petani, buruh bangunan, berkebun, dan wirausaha lainnya menjadikan peran koperasi sangatlah membantu dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Peran koperasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway XVI menggunakan indikator ACTORS (*Authority, Confidence and competence, Trust, Opportunity, Responsibility, Support*).

Berdasarkan analisis data penelitian keberadaan koperasi desa turut membantu dan mengembangkan berbagai sektor kegiatan yang dilakukan oleh anggota koperasi. Adapun beberapa sektor kegiatan yang dijalankan oleh anggota koperasi seperti sektor pertanian, perdagangan, dan industri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariani, H, (2016) *Analisis Pemberdayaan Petani Dhuafa (Studi Kasus di Pertanian Sehati Indonesia)*, Kordinat, XV(2).
- Arikunto, S, (2002) *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Bina Aksara.
- Arita, Marini, (2008) *Ekonomi dan Sumber Daya*. Jakarta: Depdiknas.
- Azwar, S, (1998) *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bahri, E. S, (2013) *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi*, Kediri: FAM Publishing.
- Hendrojogi, (2004) *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hikmat Kusumaningrat (2009), *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nasution, S, (2003) *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Noor, M, (2011) *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah CIVIS, 1(2).
- Nur Syamsudin Buchori, (2012) *Koperasi Syariah: Teori dan Praktek*, Tangerang: Pustaka Aufa Media.
- Ropke, Jochen, (2003) *Ekonomi Koperasi, Teori dan Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudaryat Permana, (2009) *Bikin Perusahaan Itu Gampang*, Yogyakarta: MedPress.
- Sutikno, S, (2005) *Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem*, Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan.
- Zubaedi, (2013) *Pengembangan Masyarakat (Wacana & Praktik)*, cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana.)